

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Kinerja lingkungan adalah hasil dari strategi perusahaan dalam mengelola (atau tidak) lingkungan dan dampaknya terhadap lingkungan alam (Walls dkk., 2012; Walls dkk., 2011). Indikator kinerja lingkungan terbagi kedalam tiga kategori utama, yaitu dampak lingkungan; kepatuhan terhadap peraturan dan proses organisasi yang meliputi sistem manajemen lingkungan, pelaporan informasi lingkungan, akuntansi lingkungan (Delmas dan Blass, 2010). Kebijakan pengelolaan lingkungan disetiap perusahaan tentu akan berbeda, salah satunya karena faktor diversitas dari manajemen puncak yang meliputi latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman (García Martín dan Herrero, 2019). Salah satu latar belakang yang dapat dimiliki dewan komisaris dan direksi adalah memiliki pengalaman bekerja di pemerintahan atau adanya koneksi politik.

Di Indonesia, perusahaan dapat didefinisikan memiliki koneksi politik jika memenuhi salah satu kriteria di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/3/PBI/2010 penjelasan pasal 11 yang mencantumkan siapa saja yang dikategorikan ke dalam kategori *Politically Exposed Person*, diantaranya :

1. Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;
2. Wakil Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan;
3. Pejabat setingkat Menteri;
4. Eksekutif Senior perusahaan Negara;
5. Direktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
6. Eksekutif dan ketua partai politik;
7. Pejabat senior di bidang militer dan/atau kepolisian;
8. Pejabat Senior di lingkungan Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung;
9. Pejabat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden;

10. Anggota keluarga (pasangan, orang tua, saudara, anak, menantu, cucu) dari kategori-kategori di atas; dan
11. Siapapun orang yang tidak termasuk di atas namun karena posisinya yang tinggi di masyarakat, pengaruhnya yang signifikan, status selebriti dan/atau kombinasi dari posisinya dapat menempatkan penyedia jasa keuangan dalam posisi berisiko harus masuk dalam kategori berisiko tinggi.

Dalam penelitian ini, peneliti melihat perusahaan yang memiliki koneksi politik sebagaimana terpenuhinya salah satu kriteria dalam kategori *Politically Exposed Person* terhadap kinerja lingkungan melalui konsep teori ketergantungan sumber daya. Organisasi digambarkan sebagai sistem terbuka, dimana kemampuan untuk mendapatkan sumber daya yang penting dari luar mempengaruhi kinerja mereka karena keterbatasan sumber daya yang dimiliki (Zona dkk., 2018). Perusahaan yang memiliki akses ke sumber daya yang penting dinilai dapat mengurangi ketidakpastian yang akan dialami perusahaan. Menurut Shirodkar dan Mohr (2015) dalam Zhang dkk. (2019) dalam teori ketergantungan sumber daya, menunjukkan bahwa pemerintah adalah sumber utama dari sumber daya eksternal dan merupakan peluang bagi perusahaan. Membentuk interaksi dengan regulator dan pembuat keputusan politik melalui strategi politik membantu perusahaan dalam mendapatkan berbagai manfaat, termasuk subsidi pemerintah, pengurangan risiko, dan perlakuan istimewa oleh bank yang dikendalikan pemerintah (Dinç, 2005; Johnson dan Mitton, 2003; Puck dkk., 2013; Zhang dkk., 2019).

Selain teori ketergantungan sumber daya, penelitian ini juga menggunakan teori *upper echelons* yang menyatakan bahwa keputusan strategis yang dibuat oleh manajemen puncak menentukan strategi kompetitif yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Menurut Forbes dan Milliken (1999) dalam Orazalin (2020) dewan direksi adalah *predictor* penting dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan, karena setiap pandangan dan keputusan direktur akan mencerminkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan pengalaman mereka. Shahab dkk. (2018) berpendapat bahwa tujuan organisasi akan tercapai ketika eksekutif senior,

direktur dan manajer bekerja sama sebagai tim dengan latar belakang keterampilan, keahlian, dan karakter khusus yang dapat memengaruhi pilihan strategis perusahaan dan berakibat pada peningkatan kinerja perusahaan dalam hal keuntungan, pertumbuhan dan keberlanjutan. Hambrick dan Mason (1984) dalam Post dkk. (2015) juga mengatakan bahwa semakin beragam latar belakang dewan, semakin luas ragam perspektif, semakin luas pengetahuan yang dimiliki dan semakin besar akses ke jaringan yang beragam dapat berkontribusi terhadap peningkatan pengambilan keputusan dan penyelesaian masalah.

2.2 Penelitian Terdahulu

Zhang (2017) menemukan pengaruh positif adanya koneksi politik terhadap tanggung jawab lingkungan perusahaan, terutama pada perusahaan milik negara, yang menjadi saluran penting intervensi pemerintah untuk mencapai tujuan sosial dan lingkungan. Dijelaskan bahwa koneksi politik dapat meningkatkan kinerja lingkungan melalui bantuan akses sumber daya keuangan seperti subsidi, tarif pajak yang lebih rendah dan pinjaman bank yang pada akhirnya akan membuat biaya modal perusahaan menjadi lebih rendah terkait dengan investasi lingkungan, sehingga dapat mencegah perusahaan mengalami kendala keuangan (Zhang, 2017).

Lin dkk. (2015) meneliti pengaruh koneksi politik terhadap kinerja lingkungan perusahaan dengan subsidi lingkungan sebagai mediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik secara signifikan lebih mungkin untuk mendapatkan subsidi lingkungan daripada perusahaan yang tidak terkoneksi politik (Lin dkk., 2015). Dalam penelitian Zhang dkk. (2019) juga menemukan hasil bahwa koneksi politik berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan perusahaan. Adanya koneksi politik secara positif meningkatkan inovasi teknologi hijau yang memainkan peran mediasi antara hubungan koneksi politik dengan kinerja lingkungan (Wang dkk., 2018; Zhang dkk., 2019).

Penelitian lain juga menemukan bahwa adanya koneksi politik dapat bertindak sebagai “uluran tangan” sehingga perusahaan dapat berinvestasi lebih

banyak ketika menerima subsidi pemerintah (Yu dkk., 2020). Adanya koneksi politik juga berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (Wang dkk., 2019; Wu dkk., 2018). Hal ini terjadi karena perusahaan akan menerima lebih banyak proyek investasi baru, kemudahan pinjaman bank dan meningkatkan tata kelola perusahaan (Wang dkk., 2019). Namun hasil penelitian Nasih dkk. (2019) menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki koneksi politik memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap CSR. Hal ini disebabkan adanya indikasi bahwa anggota dewan komisaris atau direksi yang terhubung secara politik akan mengorbankan kepentingan perusahaan demi meraih keuntungan pribadi atas tujuan politik yang ingin diraihnya (Nasih dkk., 2019). Cheng dkk. (2017) yang meneliti perusahaan dengan kategori “*heavily polluted industries*” di China menunjukkan hasil bahwa adanya koneksi politik memang mendorong perusahaan untuk mengungkapkan dan meningkatkan kuantitas informasi lingkungan tetapi tidak dengan kualitas dari laporan informasi lingkungan. Hal ini disebabkan motivasi dari pengungkapan informasi lingkungan adalah koneksi politik, dan manajer puncak berusaha untuk mencari promosi melalui laporan lingkungan tersebut (Cheng dkk., 2017).

2.3 Pengembangan Hipotesis Penelitian

Dalam beberapa penelitian menyatakan bahwa adanya koneksi politik dapat membantu perusahaan untuk mendapatkan akses pinjaman bank (Faccio, 2006) dan memperoleh tarif pajak yang lebih rendah (Adhikari dkk., 2006; Wu dkk., 2012). Hal ini membantu perusahaan dalam menghadapi kendala keuangan atas investasi lingkungan dan mendorong perusahaan melakukan proses produksi yang ramah lingkungan, sehingga perusahaan akan menerima banyak manfaat sosial dan politik, seperti peningkatan diferensiasi produk, peningkatan reputasi perusahaan, peningkatan hubungan dengan pekerja, pelanggan, pemasok, pemerintah dan masyarakat (Siegel, 2009).

Pfeffer dan Salancik (1978) dalam Post dkk. (2015) menyatakan bahwa dewan direktur mewakili seperangkat sumber daya strategis untuk melayani organisasi di mana mereka memberikan saran, akses informasi dan sumber daya

serta meningkatkan legitimasi untuk organisasi. Sumber daya yang dibawa direktur ke dewan mencakup pengetahuan, keterampilan, pengalaman, jaringan dan nilai-nilai (Hambrick, 2007; Hillman dkk., 2000). Karakteristik khusus yang dimiliki dewan membuat Post dkk. (2015) dalam Orazalin (2020) percaya bahwa peningkatan karakteristik dewan akan meningkatkan kinerja lingkungan perusahaan melalui tindakan strategis yang diambil terkait keberlanjutan yang efektif.

Selain itu, menurut Zhang (2017) CEO yang memiliki koneksi politik diharapkan oleh publik memiliki standar moral yang tinggi sehingga melakukan segala sesuatu dengan benar. Tekanan ini dapat memotivasi perusahaan untuk melakukan peningkatan atas kinerja lingkungannya. Selain itu, perusahaan dengan koneksi politik akan unggul dalam mengakses informasi tentang kebijakan lingkungan yang terbaru sehingga membantu untuk lebih memahami peraturan lingkungan yang dibuat (Zhang, 2017). Hal ini mempercepat perusahaan membuat keputusan yang efektif terkait investasi lingkungan dan menjadi penggerak pertama dalam investasi awal teknologi lingkungan. Dengan demikian hipotesis penelitian ini adalah :

Hipotesis : Koneksi politik berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan perusahaan.